

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada sektor pemerintah di Indonesia euphoria atas perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pada entitas pemerintahan, mereka seakan-akan terobsesi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan yang di hasilkan. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan oleh auditor atas pemeriksaan laporan keuangan. Pada sektor public di Indonesia opini tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah diperiksa dan tersaji secara wajar.

Konsep wajar timbul dari berbagai standar dan peraturan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Konsep kewajaran dalam audit terkonsentrasi pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Wajar berarti informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan telah diperiksa dan diungkapkan dengan cara yang objektif tanpa adanya intervensi dari kepentingan pihak manapun (Auliyana,2017). Wajar disini menjadi suatu istilah teknis yang memiliki arti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku. Para informan memaknai kata wajar sebagai bentuk kepatuhan kepada hukum sehingga dianggap sebagai suatu keharusan dan sebagai pejabat, informan merasa harus patuh pada otoritas penyusun peraturan.

Kata wajar pada laporan keuangan merupakan suatu bagian yang terpenting dari sebuah entitas. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data dimana dilakukan dengan cara sistematis dan bertujuan untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja suatu organisasi (Rosmery, 2016:39).

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan media yang digunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut di kukuhkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah merevisi standar akuntansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas laporannya yaitu menggantikan PP No.24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010. Dalam perubahan tersebut, standar akuntansi pemerintah yang dulu berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) akan berubah menjadi berbasis akrual (*Accrual Basic*). Diharapkan dari perubahan penerapan SAP berbasis akrual tersebut dapat memperbaiki permasalahan umum

yang terjadi di instansi pemerintah mengenai kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan demikian sebuah instansi dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangannya.

Setelah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini maka dapat mengetahui kualitas dari laporan keuangan satuan kerja tersebut. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015). Karena laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan secara efektif.

Bagi pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, demi meningkatkan kualitas transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Warsito,2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Untuk menunjukkan baik maupun tidaknya kualitas sebuah laporan keuangan, dapat diketahui melalui opini yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan tingkatan kualitas laporan keuangan tertinggi yang diberikan oleh BPK untuk menyatakan laporan keuangan telah sesuai dengan standar. Kriteria yang harus dimiliki oleh laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas diantaranya adalah relevan, andal, bisa dibandingkan, dan mudah dipahami (PP No. 24 Tahun 2005).

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan yang menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan 3 akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 1.1  
Opini BPK atas LKKL

No	Tahun	Opini BPK atas LKKL
1	2015	WTP
2	2016	WTP
3	2017	WTP
4	2018	WTP
5	2019	WTP

Sumber : BPK.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 Pusat pemanfaatan penginderaan jauh LAPAN selalu mendapatkan opini WTP yang artinya menunjukkan bahwa penyelenggaraan anggaran satuan kerja ini sudah dijalankan dengan baik, serta membuktikan bahwa laporan keuangannya sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Dalam Sudut pandang Islam mengenai pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang dituangkan dalam lembaran kertas sebagai bukti telah melakukan pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi. Dalam konteks yang lebih luas setiap umat manusia bermuamalat yang menimbulkan transaksi baik dalam skala kecil maupun besar harus mencatatnya. Secara filosofi tujuan pencatatan adalah untuk menghindari kesalahan karena manusia bersifat lupa, baik yang bersifat kewajiban maupun yang menjadi hak bagi setiap manusia yang bermuamalat (Syahman Sitompul, 2015). Hal ini dinyatakan dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu melukiskannya dengan benar.”*

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik dengan hasil opini yang diberikan BPK tentang laporan keuangan satuan kerja ini. Dengan adanya opini yang konsisten di setiap tahunnya membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kualitas laporan keuangan pada Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN, maka dari itu penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Nanda Safrizal dan Fauziah Aida Fitri (2018) tentang “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Bener Meriah)” dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis hanya ingin mengetahui bagaimana penerapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan dalam Rangka Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka dituntut untuk menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) serta ditunjang dengan kualitas laporan keuangan.

Permasalahan yang terumuskan antara lain :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ?
3. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari sudut pandang Islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah pada Satuan Kerja Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari sudut pandang Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Bagi Penulis**

Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

### **1.4.2. Bagi Instansi**

- a. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi instansi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
- b. Dapat menjadi gambaran bagi instansi untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).